

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari Sungai Pulai Tahun 2021 Kepada BAMUS Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sholawat dan salam marilah sama sama kita haturkan kejunjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mereformasi tatanan kehidupan dari alam Jahiliyah kealam beradab seperti yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Sungai Pulai Kepada Bamus Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2021, Berpedoman Kepada ketentuan pasal 13 Ayat 2 Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dinyatakan bahwa Wali Nagari berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BAMUS Nagari dan memberikana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) kepada Bupati serta menginformasikan LPPN tersebut kepada masyarakat.

Penyampaian LKPJ Wali Nagari Sungai Pulai Akhir Tahun Anggaran 2021 Kepada Bamus, pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja Perangkat Nagari secara utuh sepanjang tahun 2021, berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati Wali Nagari bersama Bamus Nagari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Pulai Tahun 2018 - 2024 dan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai Nomor 05 Tahun 2013 Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

Berdasarkan hal tersebut, gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Nagari Sungai Pulai serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan yang ditunjang dan didukung oleh semua Lembaga Nagari. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan tanggungjawab bersama.

Semoga, seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Pulai menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, Amiin ...

Sungai Pulai, 05 Januari 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. DASAR HUKUM	1
B. GAMBARAN UMUM NAGARI.....	3
1. Kondisi Geografis Nagari	3
2. Gambaran Umum Demografis Nagari	5
3. Kondisi Ekonomi	10
 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI	 12
A. VISI dan MISI	12
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	13
C. PRIORITAS PEMERINTAHAN NAGARI	16
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN	 17
PEMERINTAHAN NAGARI	
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	17
1. Intensifikasi dan Eksistensifikasi Pendapatan Nagari	17
2. Target dan Realisasi Pendapatan	18
3. Permasalahan dan Penyelesaian	19
B. PENGELOLAAN BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAHAN	19
NAGARI	
1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari	20
2. Target dan Realisasi Belanja	22
3. Permasalahan dan Penyelesaian	22
 BAB IV. PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI	 24
A. HAK ASAL USUL NAGARI	
1. Program dan Kegiatan	24
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	25
3. Permasalahan dan Penyelesaian	26
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN.....	30
1. Program dan Kegiatan	30

BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN YANG DITERIMA	31
A. PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	33
1. Dasar Hukum	33
2. Instansi Pemberi Tugas Perbantuan	33
3. Satuan Kerja Perangkat Nagari	33
4. Kegiatan yang diterima	33
5. Sumber dan Jumlah Anggaran	34
6. Permasalahan dan Penyelesaian	34
BAB VI. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA	33
A. KERJASAMA ANTAR NAGARI	33
1. Kebijakan dan Kegiatan	33
2. Pelaksanaan Kegiatan	33
3. Permasalahan dan Penyelesaian	33
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	33
4. Kebijakan dan Kegiatan	33
5. Pelaksanaan Kegiatan	33
6. Permasalahan dan Penyelesaian	33
C. BATAS PEMERINTAHAN NAGARI	34
Permasalahan dan Penyelesaian	34
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	34
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya	34
2. Antisipasi Nagari	34
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35
1. Gangguan yang terjadi	35
2. Satuan pelaksana kegiatan Nagari	35
3. Data Perangkat Nagari	36
BAB VI. PENUTUP	38

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel – 1	Batas Wilayah Nagari Nagari Sungai Pulai	3
Tabel – 2	Luas Wilayah Nagari Sungai Pulai	3
Tabel – 3	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel – 4	Penduduk berdasarkan Usia	7
Tabel – 5	Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan	7
Tabel – 6	Penduduk berdasarkan Pendidikan	8
Tabel – 7	Penduduk berdasarkan Agama	9
Tabel – 8	Target dan Realisasi Pendapatan	19
Tabel – 10	Anggaran dan Realisasi Belanja Nagari	
Table – 11	Keamanan Kampung dan Nagari	35
Tabel – 12	Satuan Kerja Pemerintah Nagari	35
		36

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

NOMOR TAHUN 2021
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
MATERI DAN MEKANISME
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh satu, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di kantor Wali Nagari Sungai Pulai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SAIRIN
 Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pulai
 Kenagarian Sungai Pulai Kecamatan Silaut

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut

1. Nama : PUJIYONO
 Jabatan : Wali Nagari Sungai Pulai Kenagarian Sungai Pulai Kecamatan Silaut

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Wali Nagari Sungai Pulai.

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Wali Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut secara bersama telah melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pulai tentang Materi dan Mekanisme Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, melalui tingkat pembicaraan sesuai dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari.

**BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)
NAGARI SUNGAI PULAI**





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT

Jl. Trans Silaut III

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
MATERI DAN MEKANISME
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (7) Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa Hasil Penyempurnaan sebagaimana tersebut huruf a ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pulai tentang Materi dan Mekanisme Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana terlampir yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan

Ditetapkan di Sungai Pulai

Pada tanggal JANUARI 2020



BAB I PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya Pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2021 maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Bamus Nagari, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada masyarakat. Bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang telah dilaksanakan oleh Wali Nagari sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN). Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPJ Wali Nagari sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Nagari, pengelolaan keuangan Nagari secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Nagari, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada dasarnya tujuan akhir dari pada penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat, oleh karena itu dalam penyempurnaan pelaksanaannya Wali Nagari selaku Pimpinan Nagari juga berkoordinasi dengan berbagai pihak diantaranya, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Nagari lainnya yang bersinggungan dengan Nagari Sungai Pulai serta masyarakat dalam Musrenbang.

Dengan adanya nuansa demokrasi yang berkembang dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Sungai Pulai menjadikan Bamus Nagari tidak sendirian dalam menyikapi dan menanggapi kritik, saran dan harapan yang telah mampu memberikan sinergi terhadap pemecahan permasalahan maupun persoalan Nagari yang sangat kompleks agar pijakan moral atas mandat peningkatan kesejahteraan warga Nagari terpenuhi.

Sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam proses kebersamaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan atas kekurangan maupun keberhasilan serta pemetaan langkah langkah kedepan untuk perbaikan dan sekaligus sebagai peletakan pondasi yang kokoh dalam membangun Nagari Sungai Pulai kedepan.

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Sungai Pulai tahun anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor..... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor..... Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor..... Tahun 2019 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2021

B. GAMBARAN UMUM NAGARI PEMERINTAHAN NAGARI

1. KONDISI GEOGRAFIS NAGARI

a) Batas Administrasi Pemerintahan Nagari

Nagari Sungai Pulau berbatasan dengan wilayah, sebagai berikut:

Tabel 1. Batas Wilayah Nagari Nagari Sungai Pulau

No	Uraian	Batas Wilayah			Ket
		Nagari	Kecamatan	Kabupaten	
1.	Utara	Silaut	Silaut	Pesisir Selatan	
2.	Timur	Silaut	Silaut	Pesisir Selatan	
3.	Selatan	Pasir Binjai	Silaut	Pesisir Selatan	
4.	Barat	Air Hitam	Silaut	Pesisir Selatan	

Nagari Sungai Pulau secara Administratif terdiri dari 3 (Tiga) Kampung:

- 1) Kampung Tanah Nago
- 2) Kampung Silaut III
- 3) Kampung Mekar Sari Mulyo

b) Luas Wilayah

Nagari Sungai Pulau merupakan salah satu dari 10 Nagari yang berada di wilayah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Luas Wilayah 141.088 Hektar, yang terdiri dari :

Tabel 2. Luas Wilayah Nagari Sungai Pulau

Uraian	Luas
Tanah Pekarangan/Perumahan	73 Ha
Kawasan Perkebunan	15.055 Ha
Kawasan Fasilitas Umum	16 Ha

c) Topografi Nagari

Nagari Sungai Pulai letak topografis tanahnya datar, jenis Lahan gambut dan secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga sebagian besar masyarakatnya adalah Peternak Sapi, Kambing, Unggas dll.

d) Iklim

Pada umumnya di Nagari Sungai Pulai banyak turun hujan, rata-rata 2,381 milimeter per tahun dengan jumlah hujan rata-rata 193 hari per tahun dan kelembaban hawa berkisar antara min 82,0% - 90,8% . Oleh Karena itu daerah ini beriklim sedang.

e) Sejarah

Nagari Sungai Pulai pada mulanya adalah UPT Silaut III yang merupakan sebagian wilayah Nagari Silaut Kecamatan Pancung Soal (sekarang Kec. Lunang Silaut) merupakan daerah Transmigrasi. Pada tanggal 27 Maret 1991 mulailah Penempatan KK (Kepala Keluarga) yang pertama sebanyak 300 KK dan pada tanggal 28 Agustus 1991 penempatan KK di tambah lagi sebanyak 200 KK sehingganya jumlah keseluruhan menjadi 500 KK, daerah ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian kecil dari daerah Kabupaten Pesisir Selatan daerah-daerah lainnya.

Desa Mekar Sari ini terdiri dari 4 RW (Rukun Warga) 17 RT (Rumah Tangga). tahun 1997 Proyek Transmigrasi Silaut III diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Pemda Tk.II Pesisir Selatan yang kemudian daerah ini berubah menjadi sebuah Desa, dengan nama Desa MEKAR SARI

Sedangkan mengenai nama Desa “ Mekar Sari ” diambil dari : *Mekar* berarti berkembang sedangkan *Sari* adalah Tempat Inti, jadi Desa Mekar Sari ialah sebuah Desa yang pada intinya benar-benar ingin berkembang maju dari segala bidang, baik masyarakatnya, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunannya sendiri.

Desa Mekar sari (1997) pada awalnya terdiri dari 4 Dusun / RW (Rukun Warga) 17 RT (Rukun Tetangga), kemudian setelah berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah maka keluarlah Perda No 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Sistem *Kembali ke Nagari* dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor9 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Nagari. Di Kabupaten Pesisir Selatan Komitmen masyarakat untuk “*Babaliak ka Nagari*” dipertegas dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Desa Mekar Sari UPT Silaut III berubah menjadi Kampung Silaut III, di bawah naungan Pemerintahan Nagari Silaut, yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari (**Bj. INO Dt. PERMAI** : 2001-2007) dan berlanjut (**Drs. SYAFARUDDIN** 2007-2012). Kampung Silaut III pada mulanya dipimpin oleh Kepala Kampung (**TUGIMIN** : 2001-2010), kemudian berlanjut (**PUJIYONO** : 2010-2011), Seiring dengan perkembangan zaman maka Nagari Silaut dimekarkan menjadi 10 Nagari, salah satunya adalah Kampung Silaut III mekar menjadi satu Pemerintahan Nagari yang diberi nama Nagari Sungai Pulai, terdiri dari Tiga Kampung yaitu ; Kampung Tanah Nago, Kampung Silaut III dan kampung Mekar Sari Mulyo dan dipimpin oleh PJS. Wali Nagari (**BURHANUDDIN** 2011) Setelah terpilihnya Wali Nagari Definitif maka Pemerintahan Nagari Dipimpin oleh **PUJIYONO** (2012-2018), dan Bapak **PUJIYONO** Kembali menjadi Wali Nagari Definif untuk Periode (2018 – 2024).Dengan Peraturan Daerah Kembali Ke Nagari maka Desa Mekar Sari telah berubah menjadi Kampung Silaut III yang merupakan bagian dari Nagari Silaut.

Dalam perkembangannya ternyata dengan dipisahkan Kampung-kampung tersebut dan menginduk kepada Nagari Silaut mengalami perubahan dratis dalam bentuk kesadaran bersama untuk membangun wilayah yang selama ini kuat dan terarah. Dan dalam perkembangan selanjutnya terjadi gradasi disegala aspek kehidupan karena tidak menyatunya kepentingan yang sama antar kampung yang terjadi justru kompetisi yang tidak terkendali. Maka setelah hampir 10 Tahun baru Dibukanya Kran kesempatan mengajukan kembalinya Kampung Silaut III menjadi Nagari Sungai Pulai.

Nama Nagari Sungai Pulai diambil berdasarkan persetujuan dan mufakat bersama masyarakat Eks. Kampung Silaut III dan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Pemuda, Bundo Kanduang sebagai wujud rasa Solidaritas dan Kebersamaan dalam Wilayah sehingga tidak menghilangkan “Asal-Usul“ Kesejarahan keberadaan masyarakat Eks. Desa di Kenagarian Silaut, serta sejalan juga dengan Letak dan posisi Geografis Eks. Silaut III

2. KONDISI DEMOGRAFIS NAGARI SUNGAI PULAI

Nagari Sungai Pulai adalah merupakan salah satu dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. dengan luas

wilayah lebih kurang 21,80 Km², Ibukota Nagari terletak di Silaut III, Jarak dari kecamatan 8 km, dari Kabupaten 178 Km, dari Propinsi 235 Km.

Tabel - 1
Perkembangan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	Ket (Persentase)
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.613	
2	Jumlah KK	516	
3	Jumlah Laki-Laki	827	51,3 %
4	Jumlah Perempuan	786	48,7 %

Tabel - 2
Perkembangan Penduduk berdasarkan Jenis Kel/Kampung

NO	Kampung	Jumlah KK	Uraian	Jumlah	Ket (Persentase)
1	Tanah Nago	278	Laki-Laki	454	53,7 %
			Perempuan	391	46,3 %
2	Silaut III	141	Laki-Laki	228	50,1 %
			Perempuan	227	49,9 %
3	Mekar Sari Mulyo	97	Laki-Laki	145	46,3 %
			Perempuan	168	53,7 %

Tabel - 3
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur.

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	> 0 – 6 th	82	82	164
2	7 – 12 th	99	71	170
3	13 – 18 th	82	85	167

4	19 – 30 th	131	153	284
5	31 – 60 th	338	321	659
6	61 – 75 th	76	67	143
7	>75 th	16	4	20
	Jumlah	825	758	1613

Tabel –4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

No.	Uraian	Jumlah	Ket (Persentase)
1	Petani	335	62,6 %
2	Buruh	97	18,1 %
3	Pekerja Swasta	17	3.1 %
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11	2 %
5	Pengrajin	14	2,6 %
6	Bengkel	9	1,7 %
7	Perangkat Nagari	9	1.7 %
8	Honorar	11	2 %
9	Pedagang	33	6.7 %

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Nagari Sungai Pulai
1	Tidak/Belum Sekolah	59
2	Belum Tamat SD	866
3	Tamat SD	374
4	SLTP	350

5	SLTA	256
6	Akademi / D1-D3	9
7	S.1	19
8	S.2	2

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama.

Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Kelompok Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	807	758
2	Kristen	15	16
	Khatolik	5	12
JUMLAH		827	786

c. Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 8. Jumlah Sarana Pendidikan

Nagari	Jenis Sarana Pendidikan					
	TK/PAUD	SD/MI	TPA	MDA	SMP	SMA
Sungai Pulai	2	2	2	0	0	0
Jumlah	2	2	2	0	0	0

d. Jumlah Sarana Kesehatan.

Tabel 9. Jumlah Sarana Kesehatan.

No	Nagari	Jenis Sarana Kesehatan			
		Puskesmas	Polindes	Bidan desa	Posyandu
	Sungai Pulai	-	1	1	2
	Jumlah	-	1	1	2

e. Jumlah Sarana Umum.

Tabel 10. Jumlah Sarana Umum

No	Kampung	Jenis Fasilitas Umum					
		Masjid	Mushalla	Posyandu	Pos Ronda	Lapangan Sepak Bola	Lapangan VollyBall
1	Kp. Tanah Nago	-	8	1	3	-	1
2	Kp. Silaut III	1	1	1	2	1	2
3	Kp. Mekar Sari Mulyo	1	1	-	1	-	-
Jumlah		2	10	2	6	1	3

f. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari.

Tabel 11. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari.

No	Kampung	Jenis				
		Wali Nagari	Perangkat	Kp. Kampung	BAMUS	LPMN
	Kp. Tanah Nago	1	4	1	3	-
	Kp. Silaut III	-	2	1	2	-
	Kp. Mekar Sari Mulyo		1	1	-	-
Jumlah		1	7	3	5	0

3. KONDISI EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Nagari Sungai Pulai sangatlah pesat, hal ini karena Komoditi Pertanian masyarakatnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit, disisi lain juga dapat dilihat dari tingginya angka kredit masyarakat terhadap Bank Pemerintah, Swasta maupun Licence yang ada di Kecamatan Lunang dan Silaut, dan alhamdulillah secara umum bentuk kredit tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mayoritas mata pencaharian penduduk Nagari Sungai Pulai bergerak dibidang pertanian/perkebunan yaitu perkebunan kelapa sawit. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah

terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PULAI

A. Visi dan Misi

Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi dalam sebuah kalimat akronim.

***“Terwujudnya Masyarakat Nagari Yang Maju, sejahtera dan
Berbudaya”***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang dituju dimasa mendatang oleh segenap warga masyarakat Nagari Sungai Pulai, adapun pengertian dari akronim tersebut adalah:

Nagari yang ***Maju*** adalah Nagari Swasembada yang memiliki potensi Fisik dan Non Fisik yang paling baik dibandingkan dengan Nagari Terbelakang dan Nagari sedang berkembang, desa ini memiliki Sumber daya manusia yang cenderung Stabil sehingga menunjang desa untuk dapat berkembang dengan baik.

Nagari ***Sejahtera*** adalah terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi SDA (sumber Daya Alam) secara berdaya guna dan untuk memakmurkan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat serta lingkungan, dan terciptanya Nagari Sungai Pulai yang bertata rapi, bersih dan asri.

Nagari yang ***berbudaya*** adalah Nagari yang memiliki keanekaragaman Budaya dan masih menjaga kelestariannya dan bersatu padu membangun Nagari untuk meningkatkan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam tatanan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

B. Misi

Berdasarkan visi di atas untuk mencapai misi ***Nagari Sungai Pulai*** adalah dengan cara :

1. Meningkatkan Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari, Guna meningkatkan Kwaliatas Pelayan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas pemahan Masyarakat tentang Agama dan Kehidupan bermasyarakat yang lebh baik

3. Menjalankan Sistem pemerintahan yang transparan, Akuntabel, dan bisa bertanggung jawab sesuai dengan Undang undang yang berlaku.
4. Meningkatkan perekonomian Masyarakat melalui program pelatihan, penyuluhan dan permodalan.
5. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan, serta penguatan lembaga ekonomi Nagari
6. Peningkatan pembangunan infra struktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari
7. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat. sehingga terbangun insan yang cerdas, cendekia, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia
8. Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
9. Peningkatan peran masyarakat untuk kemajuan pembangunan Nagari.

C. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari

1. Strategi Pembangunan Nagari

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih apa saja yang akan dibangun. Hal ini terlebih dahulu disesuaikan dengan 4 bidang Pembangunan yang telah direncanakan meliputi Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa sumber pendanaan, baik dana dari pemerintahan pusat, daerah, maupun desa seperti PAD, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus dan Hibah dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD provinsi), Pemerintah Daerah (APBD Kabuapten), Swadaya Masyarakat maupun bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat serta dana lainnya.

2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai agenda pembangunan yang telah ditetapkan perlu disusun arah kebijakan umum pembangunan Nagari Sungai Pulai.

- a) Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Dalam mewujudkan penyelenggaraan Aparatur pemerintahan yang bersih dan Responsif, agar penyelenggara pemerintahan nagari lebih berwibawa, dan professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ditetapkan kebijakan yang diarahkan kepada:

- 1) Terwujudnya Pemerintah Nagari yang bersih dan transparan dan berdedikasi yang tinggi
- 2) Menciptakan perencanaan yang partisipatif, aplikatif dan terintegrasi
- 3) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- 4) Meningkatkan standar kualitas pelayanan diseluruh bidang

b) Meningkatkan Sektor Ekonomi Masyarakat

Kebijakan yang ditempuh untuk Meningkatkan Sektor Ekonomi Masyarakat adalah:

- 1) Peningkatan Pelatihan-pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam bentuk Study Banding
- 3) Peningkatan produksi hasil pertanian dan Peternakan dengan penentuan produk unggulan.
- 4) Membangun sistim ekonomi kerakyatan dengan pola pembinaan secara berkelanjutan.
- 5) Peningkatan jumlah dan kualitas kelembagaan koperasi, industri kecil dan menengah.
- 6) Peningkatan ketersediaan modal bagi usaha kecil dan keluarga miskin produktif.

c) Melaksanakan ajaran Agama dan pengamalan Agama Islam yang baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist

Dalam Peningkatan ajaran Agama dan Pengamalan agama Islam yang baik sesuai dengan Al'Qur'an dan Hadist adapun kebijakan diarahkan pada:

1. Melakukan Penyediaan buku-buku agama, Al-Qur'an dan Hadist
2. Menghadirkan guru-guru untuk mendidik anak-anak dan remaja untuk menanamkan akhlak yang baik untuk generasi penerus
3. Pembinaan dari para kiyai kepada Masyarakat Muslim

d) Mewujudkan Pemabangunan yang berkeadilan dan Berbasis Masyarakat

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan dan berbasis masyarakat Nagari adalah:

- 1) Memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak
- 2) Memprioritaskan Pembangunan yang benar-benar dibutuhkan
- 3) Menciptakan perencanaan kegiatan yang partisipatif, aplikatif dan integrative
- 4) Melaksanakan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah

e) Mewujudkan Masyarakat Nagari Sungai Pulai yang Aman dan Nyaman

Kebijakan yang akan dilakukan untuk terwujudnya Masyarakat yang Aman dan Nyaman tinggal di Nagari adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dari Babinsa dan Babinkamtibmas kepada Masyarakat
- 2) Penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemuda dan lembaga serta organisasi masyarakat

f) Memusyawarahkan Seluruh Kegiatan yang akan Dilakukan

Kebijakan yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan untuk peningkatan pembangunan Nagari maka perlu memusyawarahkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan serta Membudayakan kehidupan berdemokrasi dengan semua permasalahan atau yang akan dilaksanakan

D. Prioritas Nagari.

Pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Pulai untuk tahun 2021. Pekerjaan-pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu Dana Alokasi Desa (APBD) dan Dana Desa (DD). Prioritas Nagari selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbang di setiap tahun dan mengacu pada RPJM-Nagari. Semua perencanaan/pekerjaan di Nagari sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbang dan RPJM-Nagari. Pelaksanaan pembangunan yang ada di Nagari menggunakan ketentuan skala prioritas,

Berdasarkan pada kondisi dan potensi Nagari Sungai Pulai, maka pembangunan Nagari Sungai Pulai tahun 2021 diorientasikan pada :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun.
- 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya hidup bersih dan sehat.

- 3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang nagari dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya.
- 4) Penataan Manajemen Pemerintah Nagari
- 5) Penerapan Pelayanan Administrasi Dengan Sistem IT
- 6) Pembenahan Dan Penataan Kelembagaan Nagari
- 7) Pembuatan Produk Hukum Nagari Serta Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban
- 8) Penyediaan Data Base Nagari
- 9) Pengembangan usaha perdagangan Pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan
- 10) Penanggulangan Masalah Kemiskinan
- 11) Pembentukan dan pemberdayaan lembaga ekonomi nagari

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Serta Keputusan Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Melalui Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari Sungai Pulai bersama unsur BAMUS Nagari menyusun APB-Nagari Tahun 2021.

1. Intensifikasi dan Eksistensifikasi Pendapatan Nagari.

a) Intensifikasi

Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Nagari tentunya di tunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek-aspek tersebut adalah :

- 1) Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan.
- 2) Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak.
- 3) Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan / dibelanjakan

b) Ekstensifikasi

Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan/ekstensifikasi Dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan/Defisit anggaran. Yaitu dengan :

- 1) Meningkatkan budaya gotong-royong dan swadaya masyarakat guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat.
- 2) Membuat permohonan-permohonan bantuan kepada pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Nagari.

2. Target dan Realisasi Pendapatan.

Pendapatan Asli Nagari (PAN) adalah hak Pemerintahan Nagari yang diakui oleh Pemerintahan pusat berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai salah satu penambah nilai kekayaan bersih Pemerintahan Nagari guna menjalankan program pembangunan yang telah terpola dalam rencana pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Nagari (PAN) dapat dijadikan tolak ukur kemampuan Pemerintahan Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan transparan juga mencerminkan kemandirian Nagari. Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan jenis pendapatan lain selain dari Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN).

Pada Tahun 2021 Pemerintah Nagari Sungai Pulai menargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.285.740.928,27 dan terealisasi Rp. 1.268.533.893,00 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel - 10
Target dan Realisasi Pendapatan

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
1	Pendapatan Nagari		
1.1	Pendapatan Asli Nagari (PAN)	23.250.000,00	23.250.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.312.608.162,00	1.306.693.985,00
1.2.1	Dana Desa	829.623.000,00	829.623.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.336.062,00	32.421.884,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	444.649.101,00	444.649.101,00
1.2.4	Bantuan Keuangan Kab/ Kota	,0	,0
1.3	Lain2 Pendapatan Desa yang Sah	1.500.000,00	958.389,00
Jumlah Pendapatan		2.649.966.325,00	2.637.596.359,00

3. Permasalahan dan Penyelesaian.

Dengan hasil capaian selama akhir tahun anggaran 2021, bahwa antara rencana dan kenyataan masih banyak permasalahan yang perlu penanganan lebih intensif sehingga kedepan target dapat tercapai dan/atau melampaui.

Permasalahan.

- Kurangnya kesadaran masyarakat mentaati Peraturan Nagari tentang Pungutan Nagari.
- Kurang intensifnya Penyuluhan.

Penyelesaian.

- Penyampaian informasi melalui pertemuan Kampung
- Laporan perkembangan dan kegiatan Nagari dari iyuran TBS
- Pemanfaatan media informasi

B. Pengelolaan Belanja/Pengeluaran Pemerintahan Nagari

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, pemerintahan nagari dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan untuk kelancaran dalam melaksanakan program pembangunan dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Alokasi Desa adalah Dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan

untuk pemerataan keuangan antar nagari yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Desa ini telah ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintahan kabupaten termasuk kedalam pengertian kemampuan keuangan.

Pengertian pemerataan kemampuan keuangan nagari adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan nagari di seluruh daerah dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan Penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Desa (APBD) harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini merupakan indikasi ketergantungan pemerintah nagari terhadap pemerintahan daerah dari segi pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Untuk itu pemerintahan nagari dituntut harus mampu mengali sumber-sumber keuangan yang ada dinagari disamping didukung oleh perimbangan keuangan pemerintahan daerah, secara teoritis kemampuan keuangan nagari dapat di tingkatkan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari

Kebijakan Umum Keuangan Nagari Sungai Pulai yang tertuang dalam Kebijakan Umum APB-Nagari Sungai Pulai Tahun 2021 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja Nagari diarahkan sebagai berikut :

Penggunaan Dana Alokasi Desa (APBD) berpedoman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemabagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten (APBN) Tahun Anggaran 2021

Seluruh Perangkat Nagari menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable).

Mengarahkan kegiatan-kegiatan Perangkat Nagari supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Nagari ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan.

Mengarahkan kepada seluruh Perangkat Nagari agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.

Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

Prioritas belanja nagari diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola).

Alokasi Dana Desa (APBD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan Nagari.

Belanja Nagari diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Nagari dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Nagari yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja Nagari disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja Nagari diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan Perangkat Nagari dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi tanggungjawabnya. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :

Penerimaan dana bagi hasil pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan, untuk Pembangunan fisik dan untuk operasional dan Intesifikasi Peningkatan Kinerja.

Alokasi Dana Desa (APBD) diprioritaskan penggunaannya, kegiatan operasional dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana kantor Wali Nagari dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Belanja.

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021, Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:

Belanja Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Untuk Program dan Kegiatan.

Belanja Tidak Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.320.499.100,00 dan terealisasi

Rp.1.307.692.144,00 dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Pembiayaan

Pembiayaan Nagari adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan

Realisasi pembelanjaan selama Tahun Anggaran 2021, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam APB-Nagari, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi diantaranya adalah :

- Adanya silpa pada anggaran dana desa tahun 2021

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. URUSAN HAK ASAL USUL PEMERINTAHAN NAGARI

1. Program dan Kegiatan.

a) Bidang Pelayanan.

- 1) Melayani Administrasi kependudukan.
- 2) Melayani surat keterangan, SKCK, legalisasi surat, dll.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan.
- 4) Melayani data dan informasi.
- 5) Memberikan laporan dan evaluasi.
- 6) Pelaporan perkembangan penduduk.

b) Bidang Pemerintahan.

- 1) Membuat Rancangan Peraturan Nagari tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Nagari tahun Anggaran 2021.
- 2) Membuat SK yang berhubungan dengan Kegiatan Nagari.
- 3) Pembinaan Trantibmas.
- 4) Penyusunan Profil Nagari dan Evaluasi.
- 5) Peningkatan target penerimaan PBB.

c) Bidang Pembangunan.

- 1) Pelaksanaan Musrenbang
- 2) Peningkatan Jalan Kampung
- 3) Penertiban administrasi kegiatan pembangunan.
- 4) Lanjutan Pembangunan Poskesri.
- 5) Pembangunan Jembatan Lahan Usaha Tani
- 6) Pembangunan Sarana Air Bersih
- 7) Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari.

d) Bidang Sosial Kemasyarakatan.

- 1) Program Keagamaan terdiri dari

- Pemberian Bantuan Operasional TPA/MDA Se-Nagari Sungai Pulai
- Pemberian bantuan Operasional untuk Kegiatan Majelis Taklim
- Pemberian Bantuan Operasional Kegiatan Didikan Subuh dan Remaja Masjid

2) Program Kesehatan

- Pemberian bantuan insentif untuk tim penyelenggara pelayanan kesehatan
- Posyandu Nagari

3) Program Adat dan Budaya dan Olah raga

Melakukan upaya pemahaman kepada pemuda dalam rangka kegiatan olah raga untuk membangkitkan minat olah raga pemuda/pemudi se-Nagari Sungai Pulai.

4) Program Kemiskinan

- Pengusulan Peserta Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin yang tidak masuk Jamkesmas bagi masyarakat kurang mampu
- Pembagian raskin bagi rumah tangga miskin
- Pengusulan rumah yang tidak layak huni

5) Program Penanggulangan bencana

Penggalangan dana serta penyaluran bantuan bagi korban bencana.

e) Bidang Administrasi dan Kearsipan.

- 1) Membuat laporan keuangan penerimaan pendapatan Asli Nagari
- 2) Pelaksanaan Administrasi Kearsipan
- 3) Pelaksanaan Administrasi Aset Nagari

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a) Bidang Pelayanan

Dalam penyajian materi pada Bab ini, tidak mutlak menggunakan sistematika peraturan dalam Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, hal ini ditempuh dengan alasan:

- 1) Mengutamakan substansi materi yang disajikan dari pada strukturnya;
- 2) Mempermudah pemahaman karena metode yang disajikan terdapat perbandingan secara langsung antara target yang ditetapkan dengan

realisasi kinerja yang telah dicapai;

- 3) Efisiensi penyajian laporan yaitu menghindari pengulangan materi yang disajikan tanpa mengurangi substansi laporan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat nagari dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di nagari.

Pelayanan prima mengandung Pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti.

Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :

- Berorientasi kepuasan pelanggan.
- Perbaikan yang kesinambungan.
- Manajemen berdasarkan fakta.
- Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
- Mengembangkan potensi daya pikir manusia.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat nagari.

b) Bidang Pemerintahan:

Dalam pelaksanaan pemerintahan pada awal tahun 2018 pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sudah mulai sinergi namun masih perlu pembenahan dan kelengkapan perangkat dan adapun hasil – hasil yang dicapai:

- 1) Realisasi PBB per Desember 2021 mencapai Rp 20.732.725,-,- dari DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Nagari Sungai Pulai Rp 23.965.188,-

- 2) Terlaksananya Pembuatan Pernag tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Nagari Tahun 2021.

c) Bidang Pembangunan

Selama tahun anggaran 2021 Nagari Sungai Pulai telah dapat menyelesaikan beberapa program pembangunan Nagari, baik fisik maupun non fisik dimana biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan dari APB-Nagari, dan Pemerintah Daerah dari APBD.

Demikian juga tujuan dan sasaran serta manfaat dari program tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan dari pemerintah maupun masyarakat. Adapun berbagai jenis program pembangunan yang telah dilaksanakan atau terealisasi di Nagari Sungai Pulai selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1) PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Dilaksanakan pada	: Bulan Desember 2022
Selesai	: Bulan Desember 2022
Sumber biaya	: APBNagari
Swadaya	: Rp. -
Bantuan Pemerintah	: Rp. 20.000.000, -(DD)
Pengarah kegiatan	: KaSi Pelayanan dan Kesejahteraan
Manfaat	: Meningkatkan Kesejahteraan RTM
Lokasi Kegiatan	: Nagari Sungai Pulai

d) Sosial dan Kemasyarakatan

- 1) Terealisasinya pemecahan masalah yang ada pada Nagari dan lain sebagainya

e) Bidang Keuangan dan Aset

- 1) Terlaksananya administrasi pemerintah Nagari yang baik
- 2) Terlaksananya Pengarsipan surat masuk dan keluar

- 3) Terlaksananya pencatatan dan inventarisasi semua Asset Nagari dan Melakukan penomoran.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan:

- a) Terlambatnya proses pengesahan dari Kabupaten dan pencairan anggaran, sehingga kegiatan kesekretariatan terlambat dilaksanakan.
- b) Minimnya pelatihan-pelatihan untuk Peningkatan Tata Administrasi Nagari

Penyelesaian:

- a) Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah administrasi sehingga aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai.
- b) Mengadakan pelatihan untuk Perangkat Nagari.
- c) Mengoptimalkan sarana dan prasarana Administrasi sekretariatan yang ada.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021 tidak ada program dan kegiatan pembangunan, peningkatan income dan peningkatan SDM yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau dari Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh PT, CV, Kelompok atau Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Sungai Pulai tidak melalui rekening Nagari.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

A. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dasar Hukum.
 - a) Peraturan Menteri Keuangan No. 1007/KMK/04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah.
 - b) Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotan.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Pasisir Selatan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa
Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Sungai Pulai dilakukan oleh KaSi Pemerintahan sebagai Kolektor Pajak dan Perangkat serta Kepala Kampung Se-Nagari Sungai Pulai sebagai pembantu kolektor pajak.
4. Kegiatan yang diterima
 - Memilah dan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak. Jumlah SPPT yang diterima : 856 SPPT
 - Melakukan pemungutan kepada Wajib Pajak, diupayakan semenjak penyerahan SPPT.
 - Menyetor hasil pungutan kepada Bank BPR atau Petugas yang telah ditetapkan.

Pokok Pajak dan Realisasi

Jumlah Pokok Pajak	: Rp. 23.965.188,-
Potensi PBB 2021	: Rp. 21.000.000,-
Realisasi PBB 2021	: Rp. 20.703.200

 - Menginventarisir SPPT yang bermasalah antara lain: ganda, salah nama, salah alamat, salah objek/subjek dan sebagainya.
 - Menyampaikan SPPT yang bermasalah disertai dengan usulan perbaikan dari

Pemerintah Nagari kepada DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai koordinator pengelola PBB.

- Menyampaikan himbauan dan sosialisasi kepada wajib pajak.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan pemungutan berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan:

Ada SPPT Yang masih Kurang atau belum keluar

Ada SPPT yang Ganda

Ada SPPT yang tidak diketahui objeknya

Ada SPPT Yang Subjeknya tidak berdomisili di tempat

Penyelesaian:

Dalam penarikan PBB tahun 2021 Nagari Sungai Pulai dibuat dengan penarikan langsung ke Wajib Pajak oleh pembantu kolektor atau Kepala Kampung Se-Nagari Sungai Pulai.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR NAGARI

1. Kebijakan

Kebijakan Kerjasama antar Nagari dilakukan melalui Forum Wali Nagari se-Kecamatan Silaut dalam bentuk Diskusi, Tukar pendapat dan berbagi pengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada di Nagari masing-masing.

2. Jenis Kegiatan.

Pertemuan Rutin Bulanan Wali Nagari se Kecamatan Silaut yang dilakukan setiap 1 Bulan Sekali

3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam kegiatan kerjasama antar Nagari, melalui Forum Wali Nagari se-Kecamatan Silaut, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik.

4. Permasalahan dan Penyelesaian.

Dalam hal kebijakan, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan sementara belum ada permasalahan.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan

Untuk Peningkatan potensi Nagari Sungai Pulai maka Nagari Sungai Pulai bekerjasama dengan Nagari Development Center (NDC) UNAND. Kecamatan Silaut memiliki kontrak dengan NDC UNAND selama 5 Tahun.

2. Kegiatan.

Peningkatan Potensi Nagari Sungai Pulai.

3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

NDC UNAND mendatangkan Mahasiswa Universitas Andalas untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Sungai Pulai selama 1 Bulan.

4. Permasalahan dan Penyelesaian.

Untuk peningkatan potensi Nagari Sungai Pulai, Mahasiswa KKN hadir untuk membantu Masyarakat Nagari Sungai Pulai dalam meningkatkan potensi Masyarakat dalam bidang Peternakan, Perkebunan, dan potensi lainnya.

C. BATAS PEMERINTAHAN NAGARI

Batas Nagari merupakan batas wilayah Administratif di dalam Pemerintahan Nagari yang dikuatkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun Batas- batas Wilayah Nagari Sungai Pulai adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Nagari Silaut

Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Pasir Binjai

Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Nagari Silaut

Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Nagari Air Hitam

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

Bencana Alam yang terjadi di Nagari Sungai Pulai selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- COVID-19

Wilayah Nagari Sungai Pulai adalah bagian dari Kab. Pesisir Selatan, seora garis besar penyebaran Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Nagari Sungai Pulai sedikit banyaknya mengalami pengaruh terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Dalam penerapan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, menteri keuangan menganjurkan untuk memberikan Bantuan Tunai Langsung melalui Dana Desa.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani / menanggulangi bencana tersebut berkoordinasi dan bahu membahu dengan pihak yang terkait dan seluruh elemen masyarakat Nagari.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi Nagari dalam menghadapi kemungkinan bencana tersebut, diantaranya adalah:

- Sosialisai tata cara memutus matarantai penyebaran Covid-19
- Membentuk Satuan Gugus Dalam Menangani kasus Covid-19
- Memberikan Bantuan Tunai
- Langsung Kepada Masyarakat yang kurang mampu dan Sembako kepada masyarakat yang melakukan isolasi.

Daftar Nama Kepala Keluarga Yang Menerima Bantuan Tunai Langsung Covid-19 Tahun

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam melaksanakan ketertiban umum di Nagari Sungai Pulai dibentuk Satuan Keamanan Nagari, Satuan Keamanan Kampung dan berkoordinasi dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Kejadian selain tindak pidana murni seperti penghinaan, pencurian, pencemaran nama baik dan perselisihan diatasi dengan pembinaan dan musyawarah terhadap pihak yang bermasalah.

1. Gangguan yang terjadi selama tahun 2021 adalah:

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas dalam mengemudi kendaraan bermotor, sehingga terjadinya kecelakaan.

2. Satuan Kerja Keamanan Kampung/Nagari

Pada tahun 2021, masalah ketertiban dan kamanan masyarakat termasuk aman, karena hal ini didukung dengan adanya Satuan Kerja Keamanan Kampung, Satuan Kerja Keamanan Nagari dan Satuan Perangkat Pemerintahan Nagari di Nagari Sungai Pulai.

Table - 15
Satuan Kerja Keamanan Kampung dan Nagari

N O.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET
1.	INDRA ISWANDI	Kp. Tanah Nago	Keamanan Kp.Tanah Nago	
2.	GIONO	Kp. Tanah Nago	Keamanan Kp.Tanah Nago	
3.	ISMAIL	Kp. Tanah Nago	Keamanan Kp.Tanah Nago	
4.	SARNI	Kp. Tanah Nago	Keamanan Kp.Tanah Nago	
5.	RUDI SUSANTO	Kp. Tanah Nago	Keamanan Kp.Tanah Nago	
6.	RATNO	Kp. Tanah Nago	Keamanan Kp.Tanah Nago	
7.	MOH. SURURI	Kp. Silaut III	Keamanan Kampung	

			Silaut III	
8.	PENO	Kp. Silaut III	Keamanan Kampung Silaut III	
9.	IRWANTO	Kp. Mekar Sari Mulyo	Keamanan Kp. Mekar Sari Mulyo	
10.	KARNI	Kp. Mekar Sari Mulyo	Keamanan Kp. Mekar Sari Mulyo	

Tabel - 16
Satuan Kerja Pemerintah Nagari

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	PUJIYONO	Wali Nagari	Kp. Tanah Nago	
2.	SITI JUNAINI	Sekretaris Nagari	Kp. Tanah Nago	
3.	RIKA GUMALA DEWI	Bendahara	Kp. Silaut III	
4.	SUCIPTO	KaSi Pemerintahan	Kp. Kp. Silaut III	
5.	SUPRIADI	KaSi Kesra	Kp. Mekar Sari Mulyo	
6.	DORI GUSTIAN, S.Pd	KaUr. Perencanaan	Kp. Tanah Nago	
7.	RAHMAD SAFITRI YADI	Kaur. Tata Usaha	Kp. Tanah Nago	
8.	SUKARSIN	Ka. Kp. Tanah Nago	Kp. Tanah Nago	
9	MARYONO	Ka. Kp. Silaut III	Ka. Kp. Silaut III	
10	BAMBANG RIYADI	Kp. Mekar Sari Mulyo	Kp. Mekar Sari Mulyo	

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, diantaranya adalah:

- Memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan.
- Membuat siskamling
- Berusaha memberdayakan masyarakat
- Kerjasama dengan kepolisian dan FKPM

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas, diantaranya adalah:

- Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai
- Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis
- Kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga

pengamanan.

- Jumlah anggaran yang masih terbatas.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.

Untuk peran serta aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan keamanan, sampai dengan saat ini bisa dikatakan aktif dan responsif, yaitu dengan adanya Koordinasi yang baik dari Kepolisian maupun bantuan keamanan dari pihak yang berwajib.

BAB V

PENUTUP

Penyampaian LKPJ Wali Nagari Sungai Pulai Akhir Tahun Anggaran 2021 Kepada Bamus, ini pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja Perangkat Nagari secara utuh sepanjang tahun 2021, berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati Wali Nagari bersama Bamus Nagari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Pulai Tahun 2018 - 2024 dan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai Nomor 34 Tahun 2019 Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, kami atas nama Wali Nagari dan seluruh Perangkat Nagari sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu kami sangat membutuhkan saran, kritik yang sifatnya membangun baik itu dari Bamus, Masyarakat maupun Lembaga Terkait demi majunya Nagari Sungai Pulai dimasa mendatang

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada seluruh Jajaran Perangkat Nagari Sungai Pulai, Lembaga-lembaga Nagari, Unsur dan elemen masyarakat Sungai Pulai serta pihak manapun yang telah bersedia bekerjasama, membantu terselenggaranya Pemerintah Nagari ini dengan baik untuk tahun 2021 dan masa yang akan datang.

Demikian, LKPJ Tahun 2021 ini disampaikan untuk dibahas dan dirumuskan dalam Keputusan BAMUS Nagari Sungai Pulai yang berisi catatan ataupun rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Nagari pada tahun berikutnya.

PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI PERUBAHAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN
ANGGARAN 2021

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			1.344.055.800,00			1.337.358.162,00	(6.697.638,00)
4.1.	Pendapatan Asli Desa			23.250.000,00			23.250.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			18.750.000,00			18.750.000,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			18.750.000,00			18.750.000,00	0,00
	01. Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit	PAD	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	1 Tahun	15.000.000,00	0,00
	02. Bagi Hasil Sewa Kios	PAD	1 Tahun	3.750.000,00	3.750.000,00	1 Tahun	3.750.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			4.500.000,00			4.500.000,00	0,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			4.500.000,00			4.500.000,00	0,00
	01. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	4.500.000,00	4.500.000,00	1 Tahun	4.500.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.318.805.800,00			1.312.608.162,00	(6.197.638,00)
4.2.1.	Dana Desa			829.623.000,00			829.623.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa			829.623.000,00			829.623.000,00	0,00
	01. DD 2021	DDS	1 Tahun	829.623.000,00	829.623.000,00	1 Tahun	829.623.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			31.120.800,00			38.336.062,00	7.215.262,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			31.120.800,00			38.336.062,00	7.215.262,00
	01. Pajak Daerah	PBH	1 Tahun	12.067.700,00	12.067.700,00	1 Tahun	9.758.500,00	(2.309.200,00)
	02. Pajak Restribusi	PBH	1 Tahun	2.262.700,00	2.262.700,00	1 Tahun	1.944.200,00	(318.500,00)
	03. Pajak PBB-P2	PBH	1 Tahun	16.790.400,00	16.790.400,00	1 Tahun	16.790.400,00	0,00
	04. Kurang Bayar Pajak Daerah Tahun 2020	PBH	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	9.088.931,00	9.088.931,00
	05. Kurang Bayar Pajak Restribusi Tahun 2020	PBH	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	754.031,00	754.031,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			458.062.000,00			444.649.100,00	(13.412.900,00)
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			458.062.000,00			444.649.100,00	(13.412.900,00)
	01. ADD 2021	ADD	1 Tahun	458.062.000,00	458.062.000,00	1 Tahun	444.649.100,00	(13.412.900,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.000.000,00			1.500.000,00	(500.000,00)

PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI PERUBAHAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN
ANGGARAN 2021

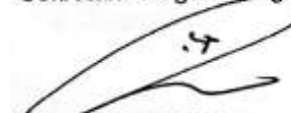
KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			0,00	0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			0,00	0,00
	01. Pengembaian Belanja Tahun Sebelumnya	DLL	1 Ls	0,00	0,00	1 Ls	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00			1.500.000,00	(500.000,00)
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00			1.500.000,00	(500.000,00)
	01. BUnga Bank	DLL	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	1 Tahun	1.500.000,00	(500.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN			1.344.055.800,00			1.337.358.162,00	6.697.638,00

Mengesahkan,



SILAUT III, 12 Januari 2022

Sekretaris Nagari Sungai Pulai


SITI JUNAINI

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAH
NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.344.055.800,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>23.250.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			18.750.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			18.750.000,00
	01. Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit	PAD	1 Tahun	15.000.000,00
	02. Bagi Hasil Sewa Kios	PAD	1 Tahun	3.750.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			4.500.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			4.500.000,00
	01. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	4.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>1.318.805.800,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			829.623.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			829.623.000,00
	01. DD 2021	DDS	1 Tahun	829.623.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			31.120.800,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			31.120.800,00
	01. Pajak Daerah	PBH	1 Tahun	12.067.700,00
	02. Pajak Restribusi	PBH	1 Tahun	2.262.700,00
	03. Pajak PBB-P2	PBH	1 Tahun	16.790.400,00
	04. Kurang Bayar Pajak Daerah Tahun 2020	PBH	Ls	0,00
	05. Kurang Bayar Pajak Restribusi Tahun 2020	PBH	Ls	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			458.062.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			458.062.000,00
	01. ADD 2021	ADD	1 Tahun	458.062.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>2.000.000,00</u>
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
	01. Pengembaian Belanja Tahun Sebelumnya	DLL	1 Ls	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. BUnga Bank	DLL	1 Tahun	2.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.344.055.800,00

Disetujui,



SILAUT III, 5 Januari 2022

Sekretaris Nagari Sungai Pulai

[Signature]
SITI JUNAINI

PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI PERUBAHAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN
ANGGARAN 2021

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			1.344.055.800,00			1.337.358.162,00	(6.697.638,00)
4.1.	Pendapatan Asli Desa			23.250.000,00			23.250.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			18.750.000,00			18.750.000,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			18.750.000,00			18.750.000,00	0,00
	01. Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit	PAD	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	1 Tahun	15.000.000,00	0,00
	02. Bagi Hasil Sewa Kios	PAD	1 Tahun	3.750.000,00	3.750.000,00	1 Tahun	3.750.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			4.500.000,00			4.500.000,00	0,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			4.500.000,00			4.500.000,00	0,00
	01. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	4.500.000,00	4.500.000,00	1 Tahun	4.500.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.318.805.800,00			1.312.608.162,00	(6.197.638,00)
4.2.1.	Dana Desa			829.623.000,00			829.623.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa			829.623.000,00			829.623.000,00	0,00
	01. DD 2021	DDS	1 Tahun	829.623.000,00	829.623.000,00	1 Tahun	829.623.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			31.120.800,00			38.336.062,00	7.215.262,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			31.120.800,00			38.336.062,00	7.215.262,00
	01. Pajak Daerah	PBH	1 Tahun	12.067.700,00	12.067.700,00	1 Tahun	9.758.500,00	(2.309.200,00)
	02. Pajak Restribusi	PBH	1 Tahun	2.262.700,00	2.262.700,00	1 Tahun	1.944.200,00	(318.500,00)
	03. Pajak PBB-P2	PBH	1 Tahun	16.790.400,00	16.790.400,00	1 Tahun	16.790.400,00	0,00
	04. Kurang Bayar Pajak Daerah Tahun 2020	PBH	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	9.088.931,00	9.088.931,00
	05. Kurang Bayar Pajak Restribusi Tahun 2020	PBH	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	754.031,00	754.031,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			458.062.000,00			444.649.100,00	(13.412.900,00)
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			458.062.000,00			444.649.100,00	(13.412.900,00)
	01. ADD 2021	ADD	1 Tahun	458.062.000,00	458.062.000,00	1 Tahun	444.649.100,00	(13.412.900,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.000.000,00			1.500.000,00	(500.000,00)

PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI PERUBAHAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN
ANGGARAN 2021

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			0,00	0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			0,00	0,00
	01. Pengembaian Belanja Tahun Sebelumnya	DLL	1 Ls	0,00	0,00	1 Ls	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00			1.500.000,00	(500.000,00)
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00			1.500.000,00	(500.000,00)
	01. BUnga Bank	DLL	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	1 Tahun	1.500.000,00	(500.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN			1.344.055.800,00			1.337.358.162,00	6.697.638,00

Mengesahkan,

SILAUT III, 5 Januari 2022



Sekretaris Nagari Sungai Pulai
[Signature]
SITI JUNAINI

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.312.608.162,00	1.306.693.985,00	5.914.177,00
Dana Desa	829.623.000,00	829.623.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.336.062,00	32.421.884,00	5.914.178,00
Alokasi Dana Desa	444.649.100,00	444.649.101,00	1,00
Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	958.389,00	541.611,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.337.358.162,00	1.330.902.374,00	6.455.788,00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	500.630.437,62	490.276.562,00	10.353.875,62
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	514.927.000,00	508.360.000,00	6.567.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	30.500.000,00	25.025.000,00	5.475.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15.021.125,00	6.200.000,00	8.821.125,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	84.370.000,00	75.032.500,00	9.337.500,00
JUMLAH BELANJA	1.145.448.562,62	1.104.894.062,00	40.554.500,62
SURPLUS / (DEFISIT)	191.909.599,38	226.008.312,00	(34.098.712,62)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	13.090.400,62	13.090.400,62	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(191.909.599,38)	(191.909.599,38)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	34.098.712,62	(34.098.712,62)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SILAUT III, 5 Januari 2021



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.		PENDAPATAN				
4.1.		Pendapatan Asli Desa	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
4.1.2.		Hasil Aset Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.2.		Pendapatan Transfer	1.318.805.800,00	1.312.608.162,00	(6.197.638,00)	
4.2.1.		Dana Desa	829.623.000,00	829.623.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.120.800,00	38.336.062,00	7.215.262,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	458.062.000,00	444.649.100,00	(13.412.900,00)	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	
4.3.5.		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.		Bunga Bank	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.344.055.800,00	1.337.358.162,00	(6.697.638,00)	
2.		BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>511.640.575,62</u>	<u>500.630.437,62</u>	<u>(11.010.138,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>455.278.825,62</u>	<u>449.081.187,62</u>	<u>(6.197.638,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.100.000,00	284.100.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.100.000,00	284.100.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.993.312,00	18.993.312,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.993.312,00	18.993.312,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,	23.580.513,62	17.382.875,62	(6.197.638,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.580.513,62	17.382.875,62	(6.197.638,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	8.305.000,00	8.305.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>34.372.500,00</u>	<u>34.372.500,00</u>	<u>0,00</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.975.000,00	24.975.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.975.000,00	24.975.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.397.500,00	9.397.500,00	0,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.397.500,00	9.397.500,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>4.812.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(4.812.500,00)</u>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.812.500,00	0,00	(4.812.500,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.812.500,00	0,00	(4.812.500,00)	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>11.303.750,00</u>	<u>11.303.750,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.741.250,00	4.741.250,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.741.250,00	4.741.250,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.777.500,00	3.777.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.777.500,00	3.777.500,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuang	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	
1.5			<u>5.873.000,00</u>	<u>5.873.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pertanahan				
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.873.000,00	5.873.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.873.000,00	5.873.000,00	0,00	
<u>2.</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>506.437.000,00</u>	<u>514.927.000,00</u>	<u>8.490.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>119.765.000,00</u>	<u>117.616.500,00</u>	<u>(2.148.500,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	24.095.000,00	21.946.500,00	(2.148.500,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.095.000,00	21.946.500,00	1.851.500,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	44.610.000,00	44.610.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.610.000,00	44.610.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>75.700.000,00</u>	<u>63.160.000,00</u>	<u>(12.540.000,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	27.480.000,00	27.480.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.480.000,00	27.480.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	12.740.000,00	0,00	(12.740.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	0,00	(12.740.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.300.000,00	6.500.000,00	200.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.500.000,00	200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>251.132.000,00</u>	<u>252.510.500,00</u>	<u>1.378.500,00</u>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	83.400.000,00	0,00	(83.400.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	58.777.000,00	129.155.500,00	70.378.500,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	58.177.000,00	128.555.500,00	70.378.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (	58.355.000,00	58.355.000,00	0,00	
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	57.755.000,00	57.755.000,00	0,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>37.500.000,00</u>	<u>57.500.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipi	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>12.710.000,00</u>	<u>3.710.000,00</u>	<u>(9.000.000,00)</u>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.710.000,00	3.710.000,00	(9.000.000,00)	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.710.000,00	3.710.000,00	(9.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>9.630.000,00</u>	<u>20.430.000,00</u>	<u>10.800.000,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.630.000,00	20.430.000,00	10.800.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.930.000,00	5.230.000,00	2.300.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	6.700.000,00	15.200.000,00	8.500.000,00	
<u>3.</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.000.000,00</u>	<u>30.500.000,00</u>	<u>(500.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>(500.000,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.698.625,00</u>	<u>15.021.125,00</u>	<u>(8.677.500,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>4.538.000,00</u>	<u>6.610.500,00</u>	<u>2.072.500,00</u>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete	4.538.000,00	6.610.500,00	2.072.500,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.538.000,00	6.610.500,00	2.072.500,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>10.750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.750.000,00)</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.750.000,00	0,00	(10.750.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	0,00	(10.750.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>5.410.625,00</u>	<u>5.410.625,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.410.625,00	5.410.625,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.625,00	3.010.625,00	0,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
<u>5.</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>84.370.000,00</u>	<u>84.370.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>58.870.000,00</u>	<u>58.870.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	58.870.000,00	58.870.000,00	0,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.870.000,00	58.870.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>25.500.000,00</u>	<u>25.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5.3.02		Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.157.146.200,62	1.145.448.562,62	(11.697.638,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	186.909.599,38	191.909.599,38	5.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.090.400,62	13.090.400,62	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	13.090.400,62	13.090.400,62	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	205.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	205.000.000,00	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(186.909.599,38)	(191.909.599,38)	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SILAUT III, 12 Januari 2022



PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		PENDAPATAN						
4.1.		Pendapatan Asli Desa		23.250.000,00		23.250.000,00	0,00	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa		18.750.000,00		18.750.000,00	0,00	
1.1.1.01.		Bagi Hasil BUMDes		18.750.000,00		18.750.000,00	0,00	
4.1.2.		Hasil Aset Desa		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
1.1.2.01.		Pengelolaan Tanah Kas Desa		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
4.2.		Pendapatan Transfer		1.318.805.800,00		1.312.608.162,00	(6.197.638,00)	
4.2.1.		Dana Desa		829.623.000,00		829.623.000,00	0,00	
1.2.1.01.		Dana Desa		829.623.000,00		829.623.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		31.120.800,00		38.336.062,00	7.215.262,00	
1.2.2.01.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		31.120.800,00		38.336.062,00	7.215.262,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa		458.062.000,00		444.649.100,00	(13.412.900,00)	
1.2.3.01.		Alokasi Dana Desa		458.062.000,00		444.649.100,00	(13.412.900,00)	
4.3.		Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00		1.500.000,00	(500.000,00)	
4.3.5.		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00		0,00	0,00	
1.3.5.01.		Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00		0,00	0,00	
4.3.6.		Bunga Bank		2.000.000,00		1.500.000,00	(500.000,00)	
1.3.6.01.		Bunga Bank		2.000.000,00		1.500.000,00	(500.000,00)	
JUMLAH PENDAPATAN				1.344.055.800,00		1.337.358.162,00	(6.697.638,00)	
2.		BELANJA						
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>		<u>511.640.575,62</u>		<u>500.630.437,62</u>	<u>(11.010.138,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		<u>455.278.825,62</u>		<u>449.081.187,62</u>	<u>(6.197.638,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 Bulan	51.600.000,00	12 Bulan	51.600.000,00	0,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai		51.600.000,00		51.600.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		51.600.000,00		51.600.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		15.600.000,00		15.600.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan	284.100.000,00	12 Bulan	284.100.000,00	0,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		284.100.000,00		284.100.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		284.100.000,00		284.100.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		223.500.000,00		223.500.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		60.600.000,00		60.600.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	18.993.312,00	12 Bulan	18.993.312,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		18.993.312,00		18.993.312,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		18.993.312,00		18.993.312,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		2.246.400,00		2.246.400,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		16.746.912,00		16.746.912,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	12 Bulan	23.580.513,62	12 Bulan	17.382.875,62	(6.197.638,00)	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		23.580.513,62		17.382.875,62	(6.197.638,00)	
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.710.513,62		6.072.875,62	362.362,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.131.763,62		1.446.875,62	315.112,00	
1.1.04	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar		236.000,00		236.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		505.250,00		552.500,00	47.250,00	
1.1.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		687.500,00		687.500,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		3.150.000,00		3.150.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		14.410.000,00		7.650.000,00	(6.760.000,00)	
1.1.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		14.410.000,00		7.650.000,00	(6.760.000,00)	
1.1.04	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		2.960.000,00		3.160.000,00	200.000,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		1.000.000,00		1.200.000,00	200.000,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.04	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		360.000,00		360.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		600.000,00		600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		900.000,00		900.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Admin Bank		100.000,00		100.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	1 Tahun	68.700.000,00	1 Tahun	68.700.000,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		68.700.000,00		68.700.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		68.700.000,00		68.700.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		68.700.000,00		68.700.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan	1 Tahun	8.305.000,00	1 Tahun	8.305.000,00	0,00	ADD, PAD, PB
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.4.	Tunjangan BPD		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.905.000,00		5.905.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.745.000,00		3.745.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		412.500,00		412.500,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		257.500,00		257.500,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		825.000,00		825.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		1.960.000,00		1.960.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		420.000,00		420.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		1.540.000,00		1.540.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		<u>34.372.500,00</u>		<u>34.372.500,00</u>	<u>0,00</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Tahun	24.975.000,00	1 Tahun	24.975.000,00	0,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal		24.975.000,00		24.975.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		2.975.000,00		2.975.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		2.975.000,00		2.975.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan		22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.01	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor		22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 Tahun	9.397.500,00	1 Tahun	9.397.500,00	0,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal		9.397.500,00		9.397.500,00	0,00	
1.2.02	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		9.397.500,00		9.397.500,00	0,00	
1.2.02	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		4.645.000,00		4.645.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		4.752.500,00		4.752.500,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		<u>4.812.500,00</u>		<u>0,00</u>	<u>(4.812.500,00)</u>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1 Tahun	4.812.500,00	1 Tahun	0,00	(4.812.500,00)	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.812.500,00		0,00	(4.812.500,00)	
1.3.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.792.500,00		0,00	(1.792.500,00)	
1.3.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		310.000,00		0,00	(310.000,00)	
1.3.02	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar		80.000,00		0,00	(80.000,00)	
1.3.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		752.500,00		0,00	(752.500,00)	
1.3.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		650.000,00		0,00	(650.000,00)	
1.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.020.000,00		0,00	(3.020.000,00)	
1.3.02	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		3.020.000,00		0,00	(3.020.000,00)	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		<u>11.303.750,00</u>		<u>11.303.750,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1 Tahun	1.190.000,00	1 Tahun	1.190.000,00	0,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.190.000,00		1.190.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.190.000,00		1.190.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		140.000,00		140.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1 Tahun	4.741.250,00	1 Tahun	4.741.250,00	0,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.741.250,00		4.741.250,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.791.250,00		2.791.250,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		57.500,00		57.500,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		258.750,00		258.750,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.475.000,00		2.475.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.950.000,00		1.950.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.950.000,00		1.950.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L	1 Paket	3.777.500,00	1 Paket	3.777.500,00	0,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.777.500,00		3.777.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.277.500,00		2.277.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		540.000,00		540.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		562.500,00		562.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		975.000,00		975.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keu	1 Tahun	1.595.000,00	Tahun	1.595.000,00	0,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.595.000,00		1.595.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		825.000,00		825.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		825.000,00		825.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		770.000,00		770.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		770.000,00		770.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan		<u>5.873.000,00</u>		<u>5.873.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 Tahun	5.873.000,00	1 Tahun	5.873.000,00	0,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.873.000,00		5.873.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.085.500,00		2.085.500,00	0,00	
1.5.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar		648.000,00		648.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.237.500,00		1.237.500,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.887.500,00		2.887.500,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		2.887.500,00		2.887.500,00	0,00	
1.5.06	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		900.000,00		900.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		700.000,00		700.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>		<u>506.437.000,00</u>		<u>514.927.000,00</u>	<u>8.490.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		<u>119.765.000,00</u>		<u>117.616.500,00</u>	<u>(2.148.500,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De	1 Tahun	43.560.000,00	1 Tahun	43.560.000,00	0,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		43.560.000,00		43.560.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		43.560.000,00		43.560.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		39.000.000,00		39.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD		4.560.000,00		4.560.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1 Tahun	24.095.000,00	1 Tahun	21.946.500,00	(2.148.500,00)	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.095.000,00		21.946.500,00	1.851.500,00	
2.1.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.575.000,00		5.742.500,00	2.167.500,00	
2.1.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		250.000,00	250.000,00	
2.1.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		0,00		1.917.500,00	1.917.500,00	
2.1.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.575.000,00		3.575.000,00	0,00	
2.1.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.880.000,00		6.204.000,00	3.324.000,00	
2.1.03	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		2.880.000,00		6.204.000,00	3.324.000,00	
2.1.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		13.640.000,00		10.000.000,00	(3.640.000,00)	
2.1.03	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		1.940.000,00		0,00	(1.940.000,00)	
2.1.03	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		11.700.000,00		10.000.000,00	(1.700.000,00)	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal		4.000.000,00		0,00	(4.000.000,00)	
2.1.03	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		4.000.000,00		0,00	(4.000.000,00)	
2.1.03	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio		4.000.000,00		0,00	(4.000.000,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/A	1 Tahun	7.500.000,00	1 Tahun	7.500.000,00	0,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	1 Paket	44.610.000,00	1 Paket	44.610.000,00	0,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		44.610.000,00		44.610.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		44.610.000,00		44.610.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi		40.050.000,00		40.050.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.90	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD		4.560.000,00		4.560.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		<u>75.700.000,00</u>		<u>63.160.000,00</u>	<u>(12.540.000,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insent	1 Paket	27.480.000,00	1 Paket	27.480.000,00	0,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		27.480.000,00		27.480.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		27.480.000,00		27.480.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD		15.480.000,00		15.480.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insenti	1 Paket	8.300.000,00	1 Paket	8.300.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.300.000,00		8.300.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.300.000,00		8.300.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan		3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan	1 Tahun	12.740.000,00	1 Tahun	0,00	(12.740.000,00)	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.740.000,00		0,00	(12.740.000,00)	
2.2.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		12.740.000,00		0,00	(12.740.000,00)	
2.2.03	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		10.340.000,00		0,00	(10.340.000,00)	
2.2.03	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		2.400.000,00		0,00	(2.400.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 Paket	6.300.000,00	1 Paket	6.500.000,00	200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.300.000,00		6.500.000,00	200.000,00	
2.2.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.400.000,00		3.400.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		100.000,00		100.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		100.000,00		100.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.800.000,00		3.000.000,00	200.000,00	
2.2.04	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada		2.800.000,00		3.000.000,00	200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1 paket	11.280.000,00	1 paket	11.280.000,00	0,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		11.280.000,00		11.280.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		11.280.000,00		11.280.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.06	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi		6.720.000,00		6.720.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD		4.560.000,00		4.560.000,00	0,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	1 Tahun	9.600.000,00	1 Tahun	9.600.000,00	0,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.600.000,00		9.600.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		9.600.000,00		9.600.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi		5.040.000,00		5.040.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD		4.560.000,00		4.560.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		<u>251.132.000,00</u>		<u>252.510.500,00</u>	<u>1.378.500,00</u>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1 Tahun	84.000.000,00	1 Tahun	0,00	(84.000.000,00)	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		600.000,00		0,00	(600.000,00)	
2.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		600.000,00		0,00	(600.000,00)	
2.3.02	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		600.000,00		0,00	(600.000,00)	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal		83.400.000,00		0,00	(83.400.000,00)	
2.3.02	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		83.400.000,00		0,00	(83.400.000,00)	
2.3.02	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		42.060.000,00		0,00	(42.060.000,00)	
2.3.02	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		41.340.000,00		0,00	(41.340.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1 Tahun	58.777.000,00	1 Tahun	129.155.500,00	70.378.500,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.3.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.3.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal		58.177.000,00		128.555.500,00	70.378.500,00	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		58.177.000,00		128.555.500,00	70.378.500,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		28.985.000,00		63.870.000,00	34.885.000,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		29.192.000,00		64.685.500,00	35.493.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Des	1 Tahun	58.355.000,00	1 Tahun	58.355.000,00	0,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.3.13	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.3.13	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal		57.755.000,00		57.755.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan		57.755.000,00		57.755.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja		28.750.000,00		28.750.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material		29.005.000,00		29.005.000,00	0,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	65.000.000,00	15.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		50.000.000,00		65.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.17	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		50.000.000,00		65.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.17	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi		5.000.000,00		20.000.000,00	15.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		<u>37.500.000,00</u>		<u>57.500.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak La	Unit	0,00	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.01	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (D	2 Paket	37.500.000,00	2 Paket	37.500.000,00	0,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal		37.500.000,00		37.500.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		37.500.000,00		37.500.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		37.500.000,00		18.600.000,00	(18.900.000,00)	
2.4.11	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		0,00		18.900.000,00	18.900.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		<u>12.710.000,00</u>		<u>3.710.000,00</u>	<u>(9.000.000,00)</u>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1 Paket	12.710.000,00	1 Paket	3.710.000,00	(9.000.000,00)	DDS, PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.710.000,00		3.710.000,00	(9.000.000,00)	
2.5.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.710.000,00		3.710.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar		160.000,00		160.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		200.000,00		200.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.150.000,00		1.150.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian		2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.000.000,00		0,00	(9.000.000,00)	
2.5.02	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		9.000.000,00		0,00	(9.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		<u>9.630.000,00</u>		<u>20.430.000,00</u>	<u>10.800.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1 Paket	9.630.000,00	1 Paket	20.430.000,00	10.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.930.000,00		5.230.000,00	2.300.000,00	
2.6.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		930.000,00		2.730.000,00	1.800.000,00	
2.6.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		930.000,00		2.730.000,00	1.800.000,00	
2.6.02	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		2.000.000,00		2.500.000,00	500.000,00	
2.6.02	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, k		2.000.000,00		2.500.000,00	500.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal		6.700.000,00		15.200.000,00	8.500.000,00	
2.6.02	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		6.700.000,00		6.700.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		6.700.000,00		6.700.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		0,00		8.500.000,00	8.500.000,00	
2.6.02	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		0,00		3.335.000,00	3.335.000,00	
2.6.02	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		0,00		5.165.000,00	5.165.000,00	
<u>3.</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>		<u>31.000.000,00</u>		<u>30.500.000,00</u>	<u>(500.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		<u>6.000.000,00</u>		<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1 Tahun	6.000.000,00	1 Tahun	6.000.000,00	0,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		<u>1.500.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>(500.000,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (H	2 Paket	1.500.000,00	2 Paket	1.000.000,00	(500.000,00)	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00		1.000.000,00	(500.000,00)	
3.2.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		1.500.000,00		1.000.000,00	(500.000,00)	
3.2.03	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		1.500.000,00		1.000.000,00	(500.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		<u>20.000.000,00</u>		<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemu	2 Paket	20.000.000,00	2 Paket	20.000.000,00	0,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.4				<u>3.500.000,00</u>		<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1 Paket	2.500.000,00	1 Paket	2.500.000,00	0,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1 Paket	1.000.000,00	1 Paket	1.000.000,00	0,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		475.000,00		475.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		110.000,00		110.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar		88.000,00		88.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		52.000,00		52.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		225.000,00		225.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		525.000,00		525.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi		525.000,00		525.000,00	0,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		<u>23.698.625,00</u>		<u>15.021.125,00</u>	<u>(8.677.500,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>4.538.000,00</u>		<u>6.610.500,00</u>	<u>2.072.500,00</u>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/P	1 Paket	4.538.000,00	1 Paket	6.610.500,00	2.072.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.538.000,00		6.610.500,00	2.072.500,00	
4.2.05	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.638.000,00		5.410.500,00	1.772.500,00	
4.2.05	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		500.000,00		782.500,00	282.500,00	
4.2.05	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		43.000,00		43.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		875.000,00		1.225.000,00	350.000,00	
4.2.05	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		620.000,00		1.160.000,00	540.000,00	
4.2.05	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan		1.600.000,00		2.200.000,00	600.000,00	
4.2.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		900.000,00		1.200.000,00	300.000,00	
4.2.05	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		900.000,00		1.200.000,00	300.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>10.750.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>(10.750.000,00)</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1 Tahun	10.750.000,00		0,00	(10.750.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.750.000,00	1 Tahun	0,00	(10.750.000,00)	DDS

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.02	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		10.750.000,00		0,00	(10.750.000,00)	
4.3.02	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		6.750.000,00		0,00	(6.750.000,00)	
4.3.02	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		4.000.000,00		0,00	(4.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<u>5.410.625,00</u>		<u>5.410.625,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1 Tahun	5.410.625,00	Tahun	5.410.625,00	0,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.010.625,00		3.010.625,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.510.625,00		2.310.625,00	800.000,00	
4.4.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		610.625,00		610.625,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		0,00		800.000,00	800.000,00	
4.4.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		900.000,00		900.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		700.000,00		700.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		700.000,00		700.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		800.000,00		0,00	(800.000,00)	
4.4.01	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		800.000,00		0,00	(800.000,00)	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
4.4.01	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
4.4.01	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		<u>3.000.000,00</u>		<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ko	10 Unit	3.000.000,00	10 Unit	3.000.000,00	0,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.5.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.5.02	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>		<u>84.370.000,00</u>		<u>84.370.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		<u>58.870.000,00</u>		<u>58.870.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	1 Paket	58.870.000,00	1 Paket	58.870.000,00	0,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		58.870.000,00		58.870.000,00	0,00	
5.1.01	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		58.870.000,00		58.870.000,00	0,00	
5.1.01	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		58.870.000,00		58.870.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		25.500.000,00		25.500.000,00	0,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1 Tahun	18.000.000,00	1 Tahun	18.000.000,00	0,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
5.3.02		Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	1 Paket	7.500.000,00	1 Paket	7.500.000,00	0,00	DDS
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
5.3.02	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
5.3.02	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA				1.157.146.200,62		1.145.448.562,62	(11.697.638,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)				186.909.599,38		191.909.599,38	5.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN						
6.1.		Penerimaan Pembiayaan		13.090.400,62		13.090.400,62	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya		13.090.400,62		13.090.400,62	0,00	
3.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya		13.090.400,62		13.090.400,62	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan		200.000.000,00		205.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa		200.000.000,00		205.000.000,00	5.000.000,00	
3.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa		200.000.000,00		205.000.000,00	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO				(186.909.599,38)		(191.909.599,38)	5.000.000,00	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00		0,00	0,00	

SILAUT III, 12 Januari 2022



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULANAN
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI
TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE : DESEMBER 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.250.000,00	9.500.000,00	13.750.000,00	23.250.000,00	100,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	18.750.000,00	5.000.000,00	13.750.000,00	18.750.000,00	100,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	18.750.000,00	5.000.000,00	13.750.000,00	18.750.000,00	100,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.312.608.162,00	1.240.924.428,00	65.769.557,00	1.306.693.985,00	99,55	5.914.177,00
4.2.1.	Dana Desa	829.623.000,00	829.623.000,00	0,00	829.623.000,00	100,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	829.623.000,00	829.623.000,00	0,00	829.623.000,00	100,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.336.062,00	0,00	32.421.884,00	32.421.884,00	84,57	5.914.178,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	38.336.062,00	0,00	32.421.884,00	32.421.884,00	84,57	5.914.178,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	444.649.100,00	411.301.428,00	33.347.673,00	444.649.101,00	100,00	1,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	444.649.100,00	411.301.428,00	33.347.673,00	444.649.101,00	100,00	1,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	899.338,00	59.051,00	958.389,00	63,89	541.611,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	899.338,00	59.051,00	958.389,00	63,89	541.611,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	1.500.000,00	899.338,00	59.051,00	958.389,00	63,89	541.611,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN	1.337.358.162,00	1.251.323.766,00	79.578.608,00	1.330.902.374,00	99,52	6.455.788,00
01	BELANJA						
01.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	500.630.437,62	394.361.312,00	95.915.250,00	490.276.562,00	97,93	10.353.875,62
Printed by SiskeuDes 12/01/2022 21:08:39							Halaman 1
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan		449.081.187,62	366.186.312,00	75.891.500,00	442.077.812,00	98,44	7.003.375,62

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	43.000.000,00	8.600.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	43.000.000,00	8.600.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	43.000.000,00	8.600.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	13.000.000,00	2.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.100.000,00	236.750.000,00	47.350.000,00	284.100.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	284.100.000,00	236.750.000,00	47.350.000,00	284.100.000,00	100,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.100.000,00	236.750.000,00	47.350.000,00	284.100.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	223.500.000,00	186.250.000,00	37.250.000,00	223.500.000,00	100,00	0,00
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	60.600.000,00	50.500.000,00	10.100.000,00	60.600.000,00	100,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.993.312,00	18.993.312,00	0,00	18.993.312,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	18.993.312,00	18.993.312,00	0,00	18.993.312,00	100,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.993.312,00	18.993.312,00	0,00	18.993.312,00	100,00	0,00
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00	2.246.400,00	100,00	0,00
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.746.912,00	16.746.912,00	0,00	16.746.912,00	100,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PP	17.382.875,62	10.193.000,00	5.004.000,00	15.197.000,00	87,43	2.185.875,62
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.382.875,62	10.193.000,00	5.004.000,00	15.197.000,00	87,43	2.185.875,62
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.072.875,62	5.161.000,00	809.000,00	5.970.000,00	98,31	102.875,62
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.446.875,62	985.000,00	450.000,00	1.435.000,00	99,18	11.875,62
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar	236.000,00	152.000,00	84.000,00	236.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	552.500,00	461.500,00	0,00	461.500,00	83,53	91.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	687.500,00	412.500,00	275.000,00	687.500,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000,00	2.800.000,00	2.845.000,00	5.645.000,00	73,79	2.005.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.650.000,00	2.800.000,00	2.845.000,00	5.645.000,00	73,79	2.005.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.160.000,00	2.032.000,00	1.050.000,00	3.082.000,00	97,53	78.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	360.000,00	240.000,00	120.000,00	360.000,00	100,00	0,00
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	600.000,00	350.000,00	250.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	900.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	66,67	300.000,00
5.2.5.99.	Belanja Admin Bank	100.000,00	42.000,00	280.000,00	322.000,00	322,00	222.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	57.250.000,00	11.450.000,00	68.700.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	57.250.000,00	11.450.000,00	68.700.000,00	100,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	57.250.000,00	11.450.000,00	68.700.000,00	100,00	0,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	57.250.000,00	11.450.000,00	68.700.000,00	100,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan	8.305.000,00	0,00	3.487.500,00	3.487.500,00	41,99	4.817.500,00
5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.905.000,00	0,00	3.487.500,00	3.487.500,00	59,06	2.417.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.745.000,00	0,00	3.487.500,00	3.487.500,00	93,12	257.500,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	412.500,00	0,00	412.500,00	412.500,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<u>01.02.</u>	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>34.372.500,00</u>	<u>24.975.000,00</u>	<u>9.397.000,00</u>	<u>34.372.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>500,00</u>
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.975.000,00	24.975.000,00	0,00	24.975.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	24.975.000,00	24.975.000,00	0,00	24.975.000,00	100,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	100,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00	0,00
5.3.3.2.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00	0,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.397.500,00	0,00	9.397.000,00	9.397.000,00	99,99	500,00
5.3.	Belanja Modal	9.397.500,00	0,00	9.397.000,00	9.397.000,00	99,99	500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	9.397.500,00	0,00	9.397.000,00	9.397.000,00	99,99	500,00
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	4.645.000,00	0,00	4.645.000,00	4.645.000,00	100,00	0,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	4.752.500,00	0,00	4.752.000,00	4.752.000,00	99,99	500,00
<u>01.03.</u>	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>01.04.</u>	<u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</u>	<u>11.303.750,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>4.753.750,00</u>	<u>7.953.750,00</u>	<u>70,36</u>	<u>3.350.000,00</u>
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD	1.190.000,00	602.500,00	587.500,00	1.190.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	602.500,00	587.500,00	1.190.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.190.000,00	602.500,00	587.500,00	1.190.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	140.000,00	77.500,00	62.500,00	140.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	100,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.741.250,00	825.000,00	3.916.250,00	4.741.250,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.741.250,00	825.000,00	3.916.250,00	4.741.250,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.791.250,00	825.000,00	1.966.250,00	2.791.250,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	258.750,00	0,00	258.750,00	258.750,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.475.000,00	825.000,00	1.650.000,00	2.475.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,	3.777.500,00	1.772.500,00	250.000,00	2.022.500,00	53,54	1.755.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.777.500,00	1.772.500,00	250.000,00	2.022.500,00	53,54	1.755.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.277.500,00	772.500,00	0,00	772.500,00	33,92	1.505.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	540.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	38,89	330.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	562.500,00	562.500,00	0,00	562.500,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	83,33	250.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	83,33	250.000,00
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keu	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
<u>01.05.</u>	<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>5.873.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.873.000,00</u>	<u>5.873.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.873.000,00	0,00	5.873.000,00	5.873.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.873.000,00	0,00	5.873.000,00	5.873.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.085.500,00	0,00	2.085.500,00	2.085.500,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar	648.000,00	0,00	648.000,00	648.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.237.500,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.887.500,00	0,00	2.887.500,00	2.887.500,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.887.500,00	0,00	2.887.500,00	2.887.500,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
<u>02</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>514.927.000,00</u>	<u>371.835.000,00</u>	<u>136.525.000,00</u>	<u>508.360.000,00</u>	<u>98,72</u>	<u>6.567.000,00</u>
<u>02.01.</u>	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>117.616.500,00</u>	<u>90.926.500,00</u>	<u>23.690.000,00</u>	<u>114.616.500,00</u>	<u>97,45</u>	<u>3.000.000,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De	43.560.000,00	29.040.000,00	14.520.000,00	43.560.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.560.000,00	29.040.000,00	14.520.000,00	43.560.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	43.560.000,00	29.040.000,00	14.520.000,00	43.560.000,00	100,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	39.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	3.040.000,00	1.520.000,00	4.560.000,00	100,00	0,00
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	21.946.500,00	18.946.500,00	0,00	18.946.500,00	86,33	3.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.946.500,00	18.946.500,00	0,00	18.946.500,00	86,33	3.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.742.500,00	5.742.500,00	0,00	5.742.500,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.917.500,00	1.917.500,00	0,00	1.917.500,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.204.000,00	6.204.000,00	0,00	6.204.000,00	100,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.204.000,00	6.204.000,00	0,00	6.204.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	70,00	3.000.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	70,00	3.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00
02.01.90.	Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	44.610.000,00	35.440.000,00	9.170.000,00	44.610.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.610.000,00	35.440.000,00	9.170.000,00	44.610.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	44.610.000,00	35.440.000,00	9.170.000,00	44.610.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.050.000,00	32.400.000,00	7.650.000,00	40.050.000,00	100,00	0,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	3.040.000,00	1.520.000,00	4.560.000,00	100,00	0,00
<u>02.02.</u>	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>63.160.000,00</u>	<u>42.740.000,00</u>	<u>19.320.000,00</u>	<u>62.060.000,00</u>	<u>98,26</u>	<u>1.100.000,00</u>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insan)	27.480.000,00	18.320.000,00	9.160.000,00	27.480.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.480.000,00	18.320.000,00	9.160.000,00	27.480.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.480.000,00	18.320.000,00	9.160.000,00	27.480.000,00	100,00	0,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	12.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	15.480.000,00	10.320.000,00	5.160.000,00	15.480.000,00	100,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insent)	8.300.000,00	5.900.000,00	2.400.000,00	8.300.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	5.900.000,00	2.400.000,00	8.300.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.300.000,00	5.900.000,00	2.400.000,00	8.300.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.500.000,00	2.700.000,00	800.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.500.000,00	4.600.000,00	800.000,00	5.400.000,00	83,08	1.100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	4.600.000,00	800.000,00	5.400.000,00	83,08	1.100.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.400.000,00	1.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	70,59	1.000.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	2.400.000,00	1.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.7.2.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.280.000,00	7.520.000,00	3.760.000,00	11.280.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	7.520.000,00	3.760.000,00	11.280.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.280.000,00	7.520.000,00	3.760.000,00	11.280.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.720.000,00	4.480.000,00	2.240.000,00	6.720.000,00	100,00	0,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	3.040.000,00	1.520.000,00	4.560.000,00	100,00	0,00
02.02.90.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	9.600.000,00	6.400.000,00	3.200.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	6.400.000,00	3.200.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	6.400.000,00	3.200.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.040.000,00	3.360.000,00	1.680.000,00	5.040.000,00	100,00	0,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	3.040.000,00	1.520.000,00	4.560.000,00	100,00	0,00
<u>02.03.</u>	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>252.510.500,00</u>	<u>180.048.500,00</u>	<u>72.425.000,00</u>	<u>252.473.500,00</u>	<u>99,99</u>	<u>37.000,00</u>
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	129.155.500,00	95.694.500,00	33.425.000,00	129.119.500,00	99,97	36.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	128.555.500,00	95.094.500,00	33.425.000,00	128.519.500,00	99,97	36.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	128.555.500,00	95.094.500,00	33.425.000,00	128.519.500,00	99,97	36.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	63.870.000,00	34.495.000,00	29.375.000,00	63.870.000,00	100,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	64.685.500,00	60.599.500,00	4.050.000,00	64.649.500,00	99,94	36.000,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik De	58.355.000,00	58.354.000,00	0,00	58.354.000,00	100,00	1.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	57.755.000,00	57.754.000,00	0,00	57.754.000,00	100,00	1.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	57.755.000,00	57.754.000,00	0,00	57.754.000,00	100,00	1.000,00
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	28.750.000,00	100,00	0,00
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	29.005.000,00	29.004.000,00	0,00	29.004.000,00	100,00	1.000,00
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	26.000.000,00	39.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	26.000.000,00	39.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	65.000.000,00	26.000.000,00	39.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	45.000.000,00	18.000.000,00	27.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
<u>02.04.</u>	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>57.500.000,00</u>	<u>37.500.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>57.500.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak L	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00
<u>02.05.</u>	<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	<u>3.710.000,00</u>	<u>1.280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.280.000,00</u>	<u>34,50</u>	<u>2.430.000,00</u>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.710.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	34,50	2.430.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	34,50	2.430.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.710.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	34,50	2.430.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	2.200.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	58,18	920.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02.06.</u>	<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</u>	<u>20.430.000,00</u>	<u>19.340.000,00</u>	<u>1.090.000,00</u>	<u>20.430.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.430.000,00	19.340.000,00	1.090.000,00	20.430.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	4.140.000,00	1.090.000,00	5.230.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.730.000,00	1.640.000,00	1.090.000,00	2.730.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	1.640.000,00	1.090.000,00	2.730.000,00	100,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.6.8.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00	0,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00	0,00
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	100,00	0,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	5.165.000,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00	100,00	0,00
<u>03</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.500.000,00</u>	<u>22.000.000,00</u>	<u>3.025.000,00</u>	<u>25.025.000,00</u>	<u>82,05</u>	<u>5.475.000,00</u>
<u>03.01.</u>	<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>33,33</u>	<u>4.000.000,00</u>
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	33,33	4.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	33,33	4.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	33,33	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	33,33	4.000.000,00
<u>03.02.</u>	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<u>03.03.</u>	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00
<u>03.04.</u>	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.025.000,00</u>	<u>3.025.000,00</u>	<u>86,43</u>	<u>475.000,00</u>
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	52,50	475.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	52,50	475.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	0,00
<u>04</u>	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.021.125,00</u>	<u>6.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200.000,00</u>	<u>41,28</u>	<u>8.821.125,00</u>
<u>04.02.</u>	<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>6.610.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.610.500,00</u>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/P	6.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.500,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	782.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.500,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<u>04.03.</u>	<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>04.04.</u>	<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</u>	<u>5.410.625,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>59,14</u>	<u>2.210.625,00</u>
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.410.625,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	59,14	2.210.625,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.625,00	800.000,00	0,00	800.000,00	26,57	2.210.625,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.310.625,00	800.000,00	0,00	800.000,00	34,62	1.510.625,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	610.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.625,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00
<u>04.05.</u>	<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan K	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
<u>05</u>	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>84.370.000,00</u>	<u>60.322.500,00</u>	<u>14.710.000,00</u>	<u>75.032.500,00</u>	<u>88,93</u>	<u>9.337.500,00</u>
<u>05.01.</u>	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>58.870.000,00</u>	<u>41.422.500,00</u>	<u>11.710.000,00</u>	<u>53.132.500,00</u>	<u>90,25</u>	<u>5.737.500,00</u>
05.01.01.	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	58.870.000,00	41.422.500,00	11.710.000,00	53.132.500,00	90,25	5.737.500,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.870.000,00	41.422.500,00	11.710.000,00	53.132.500,00	90,25	5.737.500,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	58.870.000,00	41.422.500,00	11.710.000,00	53.132.500,00	90,25	5.737.500,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	58.870.000,00	41.422.500,00	11.710.000,00	53.132.500,00	90,25	5.737.500,00
<u>05.03.</u>	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>25.500.000,00</u>	<u>18.900.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>21.900.000,00</u>	<u>85,88</u>	<u>3.600.000,00</u>
05.03.01.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
05.03.02.	Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	7.500.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	52,00	3.600.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	52,00	3.600.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	52,00	3.600.000,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	52,00	3.600.000,00
JUMLAH BELANJA		1.145.448.562,62	854.718.812,00	250.175.250,00	1.104.894.062,00	96,46	40.554.500,62
SURPLUS / (DEFISIT)		191.909.599,38	396.604.954,00	(170.596.642,00)	226.008.312,00	117,77	(34.098.712,62)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.090.400,62	13.090.400,62	0,00	13.090.400,62	100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.090.400,62	13.090.400,62	0,00	13.090.400,62	100,00	0,00

PERIODE : DESEMBER 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.090.400,62	13.090.400,62	0,00	13.090.400,62	100,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	205.000.000,00	200.000.000,00	5.000.000,00	205.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	205.000.000,00	200.000.000,00	5.000.000,00	205.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	205.000.000,00	200.000.000,00	5.000.000,00	205.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(191.909.599,38)	(186.909.599,38)	(5.000.000,00)	(191.909.599,38)	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	209.695.354,62	(175.596.642,00)	34.098.712,62	0,00	(34.098.712,62)

SILAUT III, 31 Desember 2021

